

MANAJEMEN TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Naufal Arkan
NPP. 30.0568

Asdaf Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email : naufal190300@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Fanila Kasmita Kusuma, S.STP, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the high intensity of landslides in Bogor Regency, so that a fast and responsive disaster emergency response operation is needed for these landslides. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the management system implemented by the Regional Disaster Management Agency of Bogor Regency in carrying out emergency response operations for landslides. **Method:** This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques through the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** results of research on the management of landslide emergency response in Bogor Regency have been carried out well in the dimensions of rapid assessment of location, damage and resources, determining emergency status and also rescuing and evacuating disaster-affected communities. In carrying out the emergency response process, several obstacles were found, including the large number of false reports related to landslides, the distance from the location of the disaster and the lack of public awareness to open roads, as well as the facilities and infrastructure that were not optimal. **Conclusion:** Some of the efforts that have been made to overcome the existing problems include increasing accuracy in receiving reports and reviewing them directly by utilizing village officials, village officials, and quick reaction teams, then coordinating and cooperating with the authorities, and also expanding good working relations with various parties.

Key words : Emergency Response Management, Disaster, Landslide

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tingginya intensitas kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor sehingga diperlukan operasi tanggap darurat bencana yang cepat dan tanggap terhadap kejadian bencana tanah longsor tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem manajemen yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dalam melakukan operasi tanggap darurat bencana tanah longsor. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** hasil penelitian manajemen tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor sudah dilakukan secara baik pada dimensi pengkajian

secara cepat lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, penentuan status keadaan darurat dan juga penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana. Dalam pelaksanaan proses tanggap darurat ditemukan beberapa hambatan diantaranya banyaknya laporan palsu terkait adanya bencana longsor, jarak lokasi terjadinya bencana dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membuka jalan, dan juga sarana dan prasarana yang dimiliki belum maksimal. **Kesimpulan:** Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam untuk mengatasi permasalahan yang ada diantaranya dengan meningkatkan kecermatan dalam menerima laporan dan meninjau langsung dengan memanfaatkan destana, perangkat desa, dan tim reaksi cepat, kemudian melakukan koordinasi dan kerjasama kepada pihak berwenang, dan juga memperluas hubungan kerja yang baik kepada berbagai pihak.

Kata Kunci : Manajemen Tanggap Darurat, Bencana, Tanah Longsor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari kepulauan terbanyak di dunia. Indonesia yang diapit oleh Samudra Pasifik dan Hindia serta benua Asia dan Australia, mempunyai 17.508 pulau. Selain itu, Indonesia juga dilintasi oleh Cincin Api dan berada diantara tiga lempeng tektonik yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan potensi bencana yang cukup besar.

Pergerakan yang dilakukan antar lempeng-lempeng tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan aktivitas gempa dan gunung api yang tergolong tinggi. Proses pergerakan lempeng yang cukup sering terjadi juga membuat bentuk permukaan bumi yang memiliki ciri tersendiri dan mempunyai berbagai jenis. Potensi bencana seperti banjir, longsor dan tsunami akan mudah terjadi jika dilihat dari wilayah pegunungan dengan lerengnya yang curam serta wilayah yang landai sepanjang pantai kepulauan.

Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun manusia sehingga berdampak timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. BNPB dalam Heryati (2020) menentukan 12 (dua belas) jenis kejadian bencana yang sering kali terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah (tanah longsor), banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim (puting beliung), gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi.

Tanah longsor merupakan peristiwa alam disebabkan oleh terganggunya kestabilan tanah yang membuat terjadinya pergeseran tanah, material batuan atau perpaduan antara keduanya yang bergerak menuruni lereng. Proses terjadinya tanah longsor dimulai meresapnya air kedalam tanah dengan volume yang cukup banyak mengakitbatkan bertambahnya berat tanah. Jika terdapat air yang masuk ke dalam tanah hingga menyentuh bidang gelincir atau lapisan tanah yang tidak bisa meresap air, maka akan membuat licinnya keadaan tanah. Sehingga, pelapukan material yang tepat di atas permukaan tanah akan mudah longsor. Alasan mengangkat permasalahan bencana tanah longsor karena Kabupaten Bogor merupakan daerah yang memiliki intensitas kejadian bencana tanah longsor yang cukup tinggi sehingga diperlukan penanganan

yang cepat dan tanggap agar mampu mengurangi jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian longsor tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan proses tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor. Bentuk geografis Kabupaten Bogor merupakan salah satunya. Bentuk geografis Kabupaten Bogor hampir semua berupa pegunungan, perbukitan dan dataran tinggi dengan material penyusun bebatuannya paling banyak dihasilkan dari letusan gunung, yang terdiri dari basalt, tufa dan andesit. Batu-batuan tersebut memiliki sifat daya resap air yang cukup tinggi sehingga air hujan yang jatuh dapat terserap secara maksimal. Namun, pelapukan dari jenis bebatuan ini cenderung rawan apabila terjadi pergerakan tanah yang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Berikutnya, jenis tanah penutup banyak terdiri dari material vulkanik lepas sangat responsif dan agak responsif terhadap erosi, antara lain Andosol, Regosol, Podsolik, Aluvial, dan Latosol.

Kemudian Kabupaten Bogor juga memiliki intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Dilihat dari klimatologi, iklim tropis basah merupakan iklim yang ada tepat di bagian Utara dari Kabupaten Bogor dan iklim tropis sangat basah di bagian Selatan, dengan curah hujan tahunan yang memiliki rata-rata sekitar 2.500 – 5.000 mm/tahun, Namun kurang dari 2.500 mm/tahun pada daerah utara dan sebagian kecil pada daerah timur. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi disertai dengan tipe geografi yang banyak terdiri dari lereng dan pegunungan menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Bogor rawan terhadap tanah longsor

Berdasarkan data kejadian bencana di Kabupaten Bogor yang diterbitkan oleh BPBD Kabupaten Bogor pada tahun 2021, jumlah kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor yaitu sebesar 514 peristiwa. Hal ini memperjelas bahwa di Kabupaten Bogor, bencana tanah longsor memiliki intensitas yang cukup tinggi. Dengan intensitas yang cukup tinggi seperti pada tabel, maka bencana tanah longsor memiliki potensi yang besar untuk memberikan efek buruk bagi keselamatan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor khususnya yang berada di daerah kawasan pegunungan dan lereng perbukitan. Tanah longsor sudah semestinya menjadi prioritas bagi pemerintah dalam melakukan mitigasi agar mengurangi dampak buruk dari terjadinya bencana tersebut

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rosyana Putri Tictona dan kawan-kawan (2020) berjudul Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Desa Sambungrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, menemukan bahwa manajemen bencana khususnya tanah longsor adalah dengan membangun masyarakat dan pemerintah yang peduli dengan dampak akibat terjadinya bencana alam, menerapkan manajemen bencana sesuai dengan prosedur yang telah dibuat, memperagakan dan menyosialisasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana, serta mematuhi regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai manajemen bencana. Penelitian Farichatun Nisa (2014) berjudul Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang, menemukan BPBD telah melakukan penanggulangan bencana melalui manajemen yang terdiri dari tahapan respon, pemulihan, dan pengembangan. Tindakan respon sebelum dan sesudah terjadinya bencana merupakan tahapan yang paling sering dilakukan oleh

BPBD Kabupaten Jombang Sedangkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana yaitu berupa partisipasi dalam bentuk gagasan pemikiran, harta benda, tenaga, kemahiran, dan keterampilan, serta partisipasi sosial. Namun partisipasi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah partisipasi sosial dan tenaga. Penelitian Rizkyah Isnaini (2019) berjudul Analisis Bencana Tanah Longsor di Wilayah Jawa Tengah, menemukan Penyebab terjadinya tanah longsor yang mengancam keselamatan hidup masyarakat sekitar adalah tingginya intensitas curah hujan, bentuk daerah berupa lereng yang curam, keadaan tanah yang mudah terkena erosi, lahan yang digunakan perlu ditinjau kembali pemanfaatannya untuk mengurangi dan mengatasi bencana longsor agar tidak terjadi lagi. Penelitian Amni Zarkasyi Rahman (2015) berjudul Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, menemukan mitigasi dilakukan secara struktural maupun non struktural. Early Warning System dan pemetaan daerah potensi bahaya merupakan Mitigasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan non struktural yang dilakukan berupa pemberian pelatihan, sosialisasi, praktek dan informasi kebencanaan. Terdapat program yang dibentuk dalam upaya mengefektifitaskan mitigasi bencana yaitu berupa pembentukan DESTANA dan Masyarakat Tangguh Bencana. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Oktavian Cendhy Bunga Pratama dkk (2017) dengan judul Kajian Kesesuaian Manajemen Bencana Terhadap Komponen Manajemen Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Tinggi di Kabupaten Karanganyar, menemukan hasil yang menunjukkan di daerah rawan bencana longsor tinggi Kabupaten Karanganyar telah mencapai kepatuhan. Daerah rawan bencana longsor tidak memiliki “Sistem Peringatan Dini” dan lampu peringatan, tetapi telah menerapkan sinyal suara konvensional. Telah dipilih titik pertemuan evakuasi meskipun daya tampungnya belum mencukupi. Jalur evakuasi menggunakan jaringan jalan eksisting dan saat ini relokasi telah diterapkan pada warga yang terdampak longsor dan tinggal tunawisma.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan yakni pada proses tanggap darurat bencana tanah longsor, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tictona, Nisa, Isnaini, Rahman, maupun Pratama yang memiliki fokus pada manajemen bencana secara umum. Kemudian perbedaan juga ditemukan pada lokus penelitian dimana penulis meneliti di daerah Kabupaten Bogor sedangkan penelitian terdahulu yang penulis jadikan inspirasi belum ada yang pernah meneliti di Kabupaten Bogor.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen tanggap darurat bencana tanah longsor yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor beserta hambatan dan upaya untuk mengatasinya.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian dengan hasil data yang bersifat deskriptif dan tertulis, baik berasal dari lisan individu-individu maupun perilaku tertentu yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah cara untuk mengetahui fungsi dari kelompok atau individu yang bisa bersumber dari konflik kemanusiaan ataupun sosial (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2006). peneliti berpendapat bahwa permasalahan yang

diteliti memiliki sifat berbelit-belit dan dapat berubah kapan saja sehingga data yang didapatkan dari para narasumber melalui wawancara langsung tersebut akan terseleksi dan menghasilkan jawaban yang bersifat alamiah. Peneliti juga bermaksud untuk menggambarkan dan menghasilkan data berupa kalimat tertulis yang berkaitan dengan manajemen tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna mengurangi kerugian akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan 6 informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor, Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Kelompok Jabatan Fungsional BPBD Kabupaten Bogor, dan Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan longsor. Kemudian untuk memperkuat data yang diperoleh, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi.

Adapun teknik analisis data yang penulis lakukan berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) yaitu terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan ditutup dengan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, dan Sumberdaya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dalam mengkaji kejadian bencana tanah longsor yaitu dengan memberdayakan destana dan tim reaksi cepat untuk menentukan tingkat kerusakan, luas wilayah yang terdampak dan melaporkan hasil kajiannya kepada pusat dalam waktu secepat mungkin agar pusat dapat menentukan langkah apa yang harus diambil. Metode ini dilakukan karena wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas dan sangat jauh dari jangkauan BPBD pusat, sehingga memerlukan waktu berjam-jam untuk sampai ke daerah lokasi longsor apabila terjadi longsor. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Bogor memberikan wewenang kepada destana untuk melakukan kaji cepat dan menentukan tingkat keparahan serta melaporkannya kepada BPBD pusat yang berada di pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan, Bapak Adam Hamdani melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mengatakan “Untuk kaji cepat bencana tanah longsor disini karena rata-rata daerah rawan longsor itu daerah tepian Kabupaten yang jauh dari jangkauan kita, jadi kita menyerahkan permasalahan kaji cepat kepada destana yang sebelumnya sudah kita edukasi terlebih dahulu, kebetulan juga kita memiliki beberapa TRC yang bertempat tinggal di daerah rawan longsor, jadi biasanya bahkan hampir semua laporan kebencanaan kami terima dari TRC sendiri. Setelah TRC atau destana melaporkan kepada kita baru kita nilai perlu atau tidaknya BPBD pusat untuk turun tangan”

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor mengharapkan dengan metode kaji cepat seperti ini dapat meringankan beban pemerintah khususnya BPBD dan menciptakan keefektifan kerja dalam melakukan proses tanggap darurat. Tim Reaksi Cepat dan Destana sendiri telah diberikan beberapa pelatihan terkait dengan kebencanaan khususnya tanah longsor, sehingga untuk bencana tanah longsor yang memiliki tingkat kerusakan dan wilayah yang terdampak tidak begitu luas dapat diatasi oleh destana yang dibantu oleh warga sekitar.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama peneliti berada di kantor BPBD Kabupaten Bogor, dari segi pemahaman dalam melakukan kaji cepat bencana tanah longsor oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor peneliti nilai sudah cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana tiap tiap anggota khususnya TRC dan jajaran pimpinan dari bidang kedaruratan dan logistik memberikan penjelasan bagaimana sistem kaji cepat yang mereka terapkan dan bagaimana cara mereka menganalisis pergeseran serta pergerakan tanah yang terjadi di daerah-daerah rawan bencana longsor. Dokumen-dokumen pelaporan hasil kaji cepat pun sudah sangat lengkap, mulai dari identitas pelapor, lokasi kejadian longsor, kerusakan yang ditimbulkan, tingkat keparahan dari kerusakan tersebut, jumlah masyarakat yang terdampak, dan total kerugian semua terlampir secara lengkap dari data-data yang diberikan oleh pihak BPBD Kabupaten Bogor.

Sehingga dengan hal-hal tersebut peneliti menilai tingkat pemahaman dan sistem manajemen yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bogor dalam melakukan kaji cepat lokasi, kerusakan, dan sumberdaya bencana tanah longsor sudah sangat baik dan efektif. Tidak hanya internal BPBD yang memahami cara kaji cepat bahkan personil Destana-pun paham bagaimana cara melakukan kaji cepat. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran BPBD Kabupaten Bogor dalam memberikan sosialisasi dan edukasi bagaimana cara melakukan proses tanggap darurat bencana tanah longsor kepada desa-desa yang berada di kawasan rawan longsor. Hal ini pun dibenarkan oleh pihak destana kecamatan ciawi, desa cisarua, Bapak Ujang dan Ibu Neni dalam wawancara pada tanggal 10 Januari 2023, mengatakan “Dengan adanya pelatihan tanggap darurat untuk destana ini sangat membantu masyarakat yang berada di kawasan rawan longsor karena jika menunggu bantuan dari BPBD bisa lama sekali karena akses jalan yang susah dan biasanya disini macet apalagi dekat kawasan puncak, jadi dengan adanya destana dibantu sama TRC kita bisa menangani jika adanya longsor dengan cepat, tentunya dengan bantuan seluruh masyarakat sekitar”.

3.2. Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pada pelaksanaan proses tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor, tahapan penentuan status keadaan darurat bencana ini dilakukan setelah adanya hasil dari kaji cepat. Penilaian awal dari kaji cepat akan menghasilkan suatu kesimpulan berupa tingkat keparahan bencana, jika semakin parah tingkat bencana tersebut maka akan status keadaan darurat bisa sampai pada level provinsi bahkan nasional, namun jika hanya berskala sedang ke kecil maka status keadaan darurat hanya sampai pada level kota atau kabupaten sampai ke kecamatan atau desa.

Terkait dengan fungsi juga, penentuan status keadaan darurat bencana berfungsi untuk menentukan lamanya proses tanggap darurat ditinjau dari tingkat keparahan bencana yang terjadi, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala seksi Kedaruratan, Bapak Adam Hamdani dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mengatakan “Penetapan status keadaan darurat kita lakukan untuk menentukan tingkat penanganannya, apakah perlu BNPB turun tangan, atau BPBD Provinsi, atau Kabupaten Bogor, atau bahkan tingkat destana saja sudah cukup, ini kita lihat dari hasil kaji cepat yang dilakukan oleh tim tanggap darurat. Selain itu juga penetapan status keadaan darurat bencana biasanya kita lakukan untuk menentukan, kiranya butuh berapa lama untuk evakuasi korban, seperti itu”

Apabila waktu yang ditetapkan ternyata tidak sesuai dengan realita dilapangan maka BPBD Kabupaten Bogor dapat memberikan perpanjangan waktu proses tanggap darurat kepada instansi terkait. Untuk bencana tanah longsor lama durasi proses tanggap darurat dapat berubah-ubah biasanya disebabkan oleh faktor cuaca. Apabila saat proses pengerukan tanah terjadi hujan maka proses pengerukan diberhentikan karena dikhawatirkan akan ada longsor susulan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan juga oleh Kepala Seksi Kedaruratan, Bapak Adam Hamdani dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mengatakan “Untuk tanah longsor sendiri, pertama kita lihat dulu seberapa besar wilayah yang tertimbun tanah, jika wilayah yang tertimbun cukup besar maka kita akan mengirimkan alat berat, dan untuk waktu pengerjaannya pun bisa cepet bisa lambat, pertama di pengaruhi oleh kondisi dilapangan, kedua juga cuaca, kalau pada proses pengerukan tanah terjadi hujan ya kita otomatisasi berhenti karena khawatir takutnya ada longsor susulan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Seksi Kedaruratan untuk bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor sendiri belum ada yang sampai memakan korban jiwa cukup banyak, tingkat kerusakan yang ditimbulkan masih dapat ditangani secara maksimal. Beliau mengatakan “Kabupaten Bogor memang sering sekali terjadi longsor hampir setiap bulan pasti ada kejadian longsor, tapi ya itu untuk skalanya kecil, jadi untuk penetapan status keadaan darurat bencana tanah longsor hanya ditingkat desa mentok mentok kecamatan, untuk tingkat kabupaten Alhamdulillah jarang dan untuk durasinya sendiri untuk ditingkat desa pengerjaan 1-2 hari saja sudah cukup”.

Dari yang disampaikan beliau bisa ditarik kesimpulan untuk bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor memiliki intensitas tinggi tapi dengan skala yang cukup kecil. Sehingga penetapan status keadaan darurat yang paling sering dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bgor hanya setingkat desa dengan durasi tidak lebih dari seminggu.

3.3. Penyelamatan Dan Evakuasi Masyarakat

Pada tahapan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak akibat adanya bencana tanah longsor, Pemerintah Kabupaten Bogor melibatkan seluruh komponen untuk mengatasi permasalahan longsor tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan, Bapak Adam Hamdani dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mengatakan “Untuk proses penyelamatan sama evakuasi sekarang kita melibatkan seluruh komponen, untuk pencarian korban yang tertimbun longsor, kita dibantu oleh SAR, TNI dan Polri, kadang juga ada relawan kebencanaan yang ikut bantu kita pada proses pencarian korban, kalau untuk logistik kebencanaan sekarang sudah di pegang oleh instansi terkait, kalau untuk huntap dan huntara diambil oleh dinas PR, kalau untuk pembangunan fasilitas umum dipegang oleh dinas PU, kalau untuk kebutuhan sandang, pangan, papan bagi masyarakat yang terdampak dipegang oleh dinsos dibantu oleh dinas ketahanan pangan, seperti itu”.

Dari apa yang disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk proses penyelamatan dan evakuasi semua diserahkan kepada instansi pemerintahan masing masing sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Namun, untuk proses penyelamatan dan evakuasi semua tetap dibawah komando BPBD Kabupaten Bogor. Dalam melihat bagaimana proses penyelamatan dan evakuasi masyarakat akibat bencana, peneliti menguraikannya kedalam beberapa indikator yang telah disampaikan oleh Anies (2018), Ia membagi proses penyelamatan

dan evakuasi masyarakat kedalam tiga langkah, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam proses penyelamatan dan evakuasi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat pada saat kondisi bencana terjadi kemungkinan fasilitas umum, terutama yang menyangkut logistik seperti pasar baik tradisional maupun modern mengalami kerusakan dan juga akses air bersih menjadi terhambat karena adanya campuran dari longsoran. Sehingga pemenuhan kebutuhan dasar menjadi hal yang penting bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Pemenuhan kebutuhan dasar sendiri, Kabupaten Bogor menyerahkannya kepada Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan, sehingga BPBD tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri masalah pemenuhan kebutuhan dasar. BPBD hanya memiliki kewenangan untuk mengomandoi dan juga ikut serta mengawasi jalannya proses tanggap darurat. Pada wawancara yang dilakukan ditanggal 13 Januari 2023 bersama Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kedaruratan, menyampaikan “Masalah pemenuhan kebutuhan dasar, kita BPBD hanya bisa mengomandoi kepada dinsos atau dinketpang untuk turun langsung memberikan logistik kebencanaan kepada korban, karena anggaran untuk itu sudah tidak lagi ada di BPBD melainkan sudah diserahkan semuanya kepada dinas-dinas terkait. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar sendiri, selama kita melakukan proses tanggap darurat khususnya longsor di Sukajaya karena itu yang paling parah, itu sudah cukup bagus karena selama hampir 1 tahun kita melakukan proses tanggap darurat tidak ada keluhan dari masyarakat itu sendiri terkait sandang, pangan, dan papan”

BPBD menilai logistik yang dikerahkan oleh Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan sudah cukup bagus. BPBD menilai baik karena selama proses tanggap darurat bencana tanah longsor berlangsung tidak ada keluhan dari masyarakat terkait dengan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kemudian ditambahkan oleh Kepala Seksi Logistik, Bapak Andi Sumardi dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2023, mengatakan “Betul mas, untuk sekarang logistik kebencanaan diserahkan kepada instansi OPD-OPD terkait, kita hanya sebagai komando proses tanggap darurat. Untuk dana logistik kebencanaan yang dipegang sama kita pun itu hanya logistic untuk tim tanggap darurat, seperti makan mereka, tempat tinggal mereka, tenda-tenda, peralatan-peralatan itu dari kami, jadi sekarang kita benar benar tidak pegang anggaran logistic kebencanaan untuk masyarakat”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sekarang logistik kebencanaan dipegang oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang terdampak. Kemudian dari observasi yang peneliti lakukan, peneliti menilai untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah cukup baik. Karena pada saat peneliti turun kelapangan untuk bertanya kepada warga yang berada dikawasan longsor, mereka merasa

puas dengan kinerja BPBD yang gerak cepat apabila terjadinya longsor, dan bantuan kebencanaan pun selalu silih berganti berdatangan, baik dari dinas maupun dari relawan kebencanaan.

b. Perlindungan Kepada Kelompok Rentan

Perlindungan terhadap kelompok rentan pada saat terjadinya bencana di Kabupaten Bogor sudah diterapkan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. BPBD Kabupaten selalu mengutamakan kelompok rentan pada setiap proses penyelamatan dan evakuasi korban. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan, Bapak Adam Hamdani dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mengatakan “Kita pada saat melakukan proses tanggap darurat selalu mengutamakan kelompok rentan terlebih dahulu, seperti anak-anak, lansia, wanita hamil, baru setelah itu kita mengutamakan masyarakat yang diluar golongan tersebut. Karena kita menilai kelompok rentan ini memiliki risiko terkena dampaknya cukup besar seperti wanita hamil yang susah untuk bergerak pada saat terjadinya guncangan, anak-anak yang belum mengerti cara menyelamatkan diri begitupun sama dengan lansia seperti itu”.

Kejadian tanah longsor di Kabupaten Bogor rata-rata memiliki skala kejadian longsor yang kecil dan rata-rata berdampak hanya pada satu atau dua rumah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD, Bapak Ir. Asep Sulaeman dalam wawancara pada tanggal 14 Januari 2023, mengatakan “Untuk kejadian longsor di Kabupaten Bogor memang sering terjadi, namun skalanya hanya kecil, biasanya yang terdampak hanya 1 atau 2 rumah, atau ada juga yang Cuma kena kamarnya, dapurnya”.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Jogjogan, Bapak Maman dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023, mengatakan “Disini emang kadang suka longsor tapi paling 1 rumah atau 2 rumah, ga pernah sampai yang parah banget, kemarin juga dari pihak BPBD ada yang dateng buat nanem tumbuhan vetiver didaerah lereng”.

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak peneliti menilai dengan skala bencana yang kecil untuk perlindungan kelompok rentan masih jarang ditemukan, namun untuk bencana longsor dengan skala besar seperti yang ada di Kecamatan Sukajaya, BPBD sudah menerapkan prioritas tersebut. Dari segi penerapan skala prioritas kepada kelompok rentan, peneliti menilai BPBD Kabupaten Bogor sudah sangat baik dan disiplin pada prosesnya, ini dapat dilihat dari bagaimana jumlah korban yang minim untuk skala longsor yang besar dan juga dilihat dari pemahaman tim dalam melakukan proses penyelamatan dengan memprioritaskan kelompok rentan. Namun, untuk skala longsor yang kecil, pada proses tanggap darurat proses perlindungan terhadap kelompok rentan tidak diperlukan, karena dampak kerusakan yang diberikanpun tidak terlalu besar.

c. Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital

Dalam proses penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana tentunya diperlukan pemulihan sarana dan prasarana vital untuk menunjang jalannya proses penyelamatan dan evakuasi masyarakat. Adapun sarana dan prasarana vital menurut Anies (2018) seperti saluran air minum, listrik dan sambungan telepon. Namun, sarana dan prasarana vital dibidang kebencanaan tidak hanya itu melainkan masih banyak lagi. Tim tanggap darurat harus segera memulihkan kembali sarana dan prasarana vital yang mengalami kerusakan akibat bencana karena ini sangat menentukan dalam mendukung upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat. Sarana dan prasarana vital kebencanaan juga dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian dan kehidupan masyarakat yang seandainya tidak cepat diperbaiki akan menurunkan taraf kehidupan masyarakat khususnya dibidang perekonomian. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Logistik, Bapak Andi Sumardi dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2023, mengatakan “BPBD Kabupaten Bogor untuk pemulihan sarana dan prasarana vital saat longsor sudah tentu pasti kita pertama, membuka saluran air bersih dan air minum, kedua kita buat tempat untuk para pengungsi mandi, bersih-bersih lah, listrik sama saluran komunikasi pun kita perhatikan, kalau terputus segera kita perbaiki. Selain hal-hal dasar seperti itu, buka jalan yang tertimbun juga termasuk pemulihan, karena kalau akses jalan tertutup longsor masyarakat tidak dapat beraktivitas, ekonomi terputus, masyarakat akan sulit memenuhi kebutuhan mereka, jadi kita juga melakukan pengerukan dan pembersihan jalan dari puing-puing akibat longoran”.

Berdasarkan apa yang disampaikan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa membuka jalan untuk akses perekonomian dasar masyarakat juga termasuk kedalam upaya pemulihan sarana dan prasarana vital. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023, mengatakan “Selama kejadian longsor yang menimpa kecamatan sukajaya, desa kiarasari juga termasuk yang terkena dampak longoran tersebut, waktu itu akses jalan terputus rumah banyak yang rusak jadi kita harus mengungsi ke sekolah dasar, ke SMA, Posyandu. Selama kami mengungsi tim tanggap darurat juga sambil melakukan proses penyelamatan, nyari korban yang belum ditemukan, buka akses jalan yang tertimbun longoran, alhamdulillahnya kebutuhan kita terpenuhi dari makanan, tempat istirahat, akses air bersih semua lancar, komunikasipun tidak terputus”. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Bogor sudah melakukan yang terbaik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Desa Kiarasari, reruntuhan bekas kejadian longsor sudah tidak ditemukan lagi dititik tersebut, akses jalanpun sudah lancar dan juga pada lereng bekas longsor sudah dibangun tembok penahan tebing yang berguna untuk mencegah terjadinya longoran dikemudian hari. Hal ini membuat peneliti menilai proses pemulihan sarana dan prasarana vital yang dilakukan BPBD sudah dilakukan semaksimal mungkin. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh pihak BPBD dan keserasian dengan apa yang disampaikan oleh pihak masyarakat peneliti menilai dalam upaya pemulihan sarana dan prasarana vital, BPBD Kabupaten Bogor sudah melakukan yang terbaik dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak.

3.4. Faktor-Faktor Penghambat dari Manajemen Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bogor

a. Banyaknya Laporan Palsu Terkait Bencana Tanah Longsor

Kabupaten Bogor dengan wilayah yang cukup luas membuat BPBD harus siap siaga apabila sewaktu-waktu menerima laporan terjadinya suatu kejadian bencana dari daerah daerah yang berada di titik – titik rawan bencana. Namun tidak jarang ditemukannya laporan-laporan palsu yang diterima oleh pihak BPBD Kabupaten Bogor. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan, Bapak Adam Hamdani dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mengatakan “Sering kita dapat panggilan dari orang orang yang ga bertanggung jawab melaporkan kalau diwilayah mereka terjadi longsor gede, bahkan setingkat kepala instansi juga ada yang melaporkan didaerah mereka terjadi longsor, jadi kita fikirnya setingkat kepala instansi pasti sudah mengecek keadaan dilapangan terlebih dahulu, jadi kita tanpa fikir panjang, kita langsung ke lokasi, pas sampai sana ternyata itu longsor yang sudah terjadi 2 tahun lalu”.

Hal seperti ini yang terkadang menjadi faktor penghambat karena bisa saja pada saat tim tanggap darurat bergerak kedaerah laporan palsu tersebut di daerah lain sedang terjadi longsor yang memang benar adanya. Sehingga waktu yang dibutuhkan tim tanggap darurat untuk ke daerah pelaporan yang benar menjadi lebih lama.

b. Jarak Lokasi Bencana dan Kurangnya Kepedulian Pengendara Untuk Membuka Jalan

Kabupaten Bogor dengan luas wilayah yang besar dengan daerah rawan bencana longsor berada dibagian pinggir Kabupaten dan jumlah penduduk yang cukup ramai membuat akses untuk pergi ketempat daerah rawan longsor membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan lokasi daerah rawan bencana longsor yang relatif jauh dan akses jalan serta kepadatan penduduk hal ini yang menjadi hambatan BPBD Kabupaten Bogor untuk bergerak menuju lokasi bencana terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kedaruratan, membutuhkan waktu 3-4 jam jalur darat untuk sampai ke titik longsor dalam kasus ini kejadian yang terjadi di Kecamatan Sukajaya.

Kemudian banyak pula hambatan yang terjadi karena tidak kepedulian masyarakat untuk memberikan akses jalan kepada kendaraan tim tanggap darurat yang sedang menyalakan sirine tanda sedang ada operasi tanggap darurat. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan, Bapak Adam dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 januari 2023, mengatakan “Hambatan yang paling sering kita temui itu sering terjadi kondisi macet, kita sudah menyalakan sirine dari mobil, tapi kendaraan dari masyarakat tidak menepi kesisi jalan, sehingga operasi pun menjadi

terhambat, ditambah dengan lokasi yang cukup jauh, jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita terhambat buat terjun ke daerah longsor”.

c. Sarana dan Prasarana yang Belum Maksimal

Dalam melakukan operasi tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti peralatan berat yang digunakan untuk mengeruk tanah dan mengangkat reruntuhan. BPBD Kabupaten Bogor dari segi sarana dan prasarana semua sudah memadai namun untuk bencana berskala besar seperti yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, BPBD Kabupaten Bogor mengalami kekurangan sarana dan prasarana khususnya peralatan berat yang digunakan untuk mengeruk tanah dan mengangkat puing puing yang menutupi akses jalan sebagai sarana penyalur logistik dan menyambung roda perekonomian masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Seksi Logistik, Bapak Andi Sumardi dalam wawancara pada tanggal 14 Januari 2023, mengatakan “Yang menghambat proses tanggap darurat itu kurangnya sarana dan prasarana yang kita miliki untuk longsor dengan skala besar, terutama peralatan berat itu pasti membutuhkan bantuan dari pihak lain, kalau kita sendiri ga akan sanggup, karena kalau sarana dan prasarana nya kurang proses tanggap darurat biasanya akan berlangsung lebih lama, tapi itu untuk yang berskala besar, kalau untuk skala kecil sarana dan prasarana kita sudah memadai”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di kantor BPBD Kabupaten Bogor, peneliti melihat untuk peralatan memang sudah cukup lengkap dan jumlahnya pun sudah cukup banyak. Namun untuk bencana tanah longsor berskala besar seperti yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, sarana dan prasarana yang dimiliki Kabupaten Bogor tidak akan memadai.

3.5. Upaya Mengatasi Hambatan Manajemen Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bogor

a. Meningkatkan Kecermatan Terhadap Setiap Laporan Kebencanaan

Setelah mendapatkan banyak laporan palsu, BPBD Kabupaten Bogor lebih menekankan kepada aparat desa dan kecamatan untuk bisa meninjau lokasi pelaporan mengenai kebenaran dari laporan tersebut sebelum nantinya BPBD yang terjun langsung ke daerah kejadian bencana. Aparat desa dan kecamatan bekerjasama dengan destana serta tim reaksi cepat yang bertempat tinggal di daerah titik pelaporan untuk mencari tau secara langsung kebenaran dari pelaporan tersebut yang kemudian hasil dari pengamatan dilaporkan kepada BPBD pusat Kabupaten Bogor. Kemudian juga BPBD meminta kepada pihak pelapor untuk menyertakan foto bukti nyata kejadian longsor dengan didalam fotonya terdapat keterangan waktu dan lokasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan, Bapak Adam Hamdani Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mengatakan “Cara kita mengatasi laporan – laporan palsu seperti ini, dari internal kita, kita semakin harus cermat dalam

menerima laporan, benar ga nih? Atau laporan palsu, jadi setiap ada laporan kita minta bukti foto beserta keterangan waktu dan lokasinya supaya jelas nih baru setelah itu kita langsung menghubungi aparat desa atau kecamatan setempat untuk mencari tau kebenaran dari informasi tersebut, kalau memang benar, kita langsung bergerak ketitik longsor, tapi kalau palsu, yasudah kita ga perlu turun”.

Dari hasil wawancara peneliti mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh BPBD untuk mengatasi masalah laporan palsu tersebut yaitu dengan meminta kepada pihak pelapor untuk wajib menyertakan bukti foto yang memiliki keterangan waktu dan tempat serta dengan melakukan kerjasama dengan pihak desa, destana dan tim reaksi cepat yang bertempat tinggal di lokasi sekitar kejadian.

b. Melakukan Koordinasi Kepada Pihak Berwenang

Kemacetan dan ketidakpedulian dari masyarakat di beberapa daerah di Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor penghambat jalannya proses tanggap darurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BPBD Kabupaten Bogor melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara melakukan kerjasama, meningkatkan komunikasi, dan memperkuat koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam mengatur jalannya lalu lintas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan, Bapak Adam Hamdani dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mengatakan “Kita untuk sampai ke lokasi bencana longsor kadang butuh waktu 2-3 jam, karena pertama emang jaraknya yang jauh dan macet, kadang juga suka kita temuin pengendara yang gamau ngalah, gamau buka jalan, untuk permasalahan ini kita kembali ke tingkat keparahan dari longsor tersebut kalau tingkat sedang ke kecil kita biasanya tidak terlalu memaksakan untuk buka jalan, tapi kalau untuk longsor dengan tingkat berat, kita biasanya melakukan kerjasama sama dishub, polantas, buat bukain jalan buat kita supaya lancar karena kalau lancarpun bisa makan waktu 1-2 jam karena jauh dan besarnya kabupaten ini”.

Kemudian upaya untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang kurang peduli dengan memberikan akses jalan kepada tim tanggap darurat adalah dengan BPBD terus memberikan sosialisasi dan edukasi terkait kebencanaan kepada masyarakat yang berada dititik – titik rawan longsor, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan, Bapak Adam Hamdani dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mengatakan “Permasalahan masyarakat yang kurang peduli, kita bekerjasama dengan bidang pra bencana, karena mereka yang punya program edukasi dan sosialisasi, kita coba untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan hal – hal apa yang diperlukan jika terjadi bencana, termasuk dengan memberikan jalan kepada tim tim yang bertugas pada saat tanggap darurat”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan upaya yang dilakukan BPBD untuk mengatasi permasalahan lokasi yang jauh dan kemacetan disertai dengan ketidakpedulian masyarakat untuk membuka jalan adalah dengan melakukan kerjasama kepada dinas perhubungan dan polisi lalu lintas untuk membantu dalam proses pembukaan jalan dan pendampingan agar jalan yang dilalui lancar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke lokasi bencana longsor bisa lebih cepat. Dan untuk permasalahan masyarakat, BPBD masih terus memberikan edukasi dan sosialisasi dengan harapan timbulnya kesadaran dalam diri

masyarakat pentingnya memberikan akses jalan saat proses tanggap darurat sedang berlangsung.

c. Memperluas Hubungan Kerja

Dalam menghadapi permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai saat bencana longsor besar seperti yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, BPBD Kabupaten meminta bantuan dari berbagai pihak baik swasta, BUMN maupun BPBD dari kota dan kabupaten lain yang berada disekitar Kabupaten Bogor seperti BPBD Kota Bogor, Depok, Cianjur, dan Sukabumi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bapak Aris Nurjatmiko dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mengatakan “Untuk permasalahan logistik, sarana dan prasarana, kita mengatasinya dengan meminta bantuan dari berbagai pihak, swasta, BUMN, bahkan BPBD daerah lain ikut membantu dengan sukarela, kenapa? Karena BPBD Kabupaten Bogor selalu dengan senang hati membantu tetangga yang mengalami bencana, kita denger depok kena musibah, kita meluncur tentunya dengan melapor kepada pihak sana dulu, hal yang sama kita lakukan terhadap cianjur dan sukabumi, yang dekat dekat saja, dengan harapan kalau kita yang nantinya terkena musibah mereka juga dengan sukarela membantu kita. Itulah pentingnya membangun hubungan kerja yang baik dengan berbagai pihak, kita minta bantuan pun tidak segan”.

Kemudian ditambahkan oleh Kepala Seksi Logistik, Bapak Andi Sumardi dalam wawancara pada tanggal 14 Januari 2023, mengatakan “Pada saat kejadian banjir dan longsor yang besar di Kecamatan Sukajaya, bantuan logistik, sarana dan prasarana berdatangan dari berbagai pihak, bantuan personil datang dari BPBD Kota, Kabupaten lain, BUMN juga memberikan bantuan peralatan berat puluhan buah ngebantu proses pengerukan tanah, pihak swasta juga memberikan logistic berupa sandang, pangan, dan papan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menangani permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana untuk bencana longsor berskala besar adalah dengan membangun relasi yang kuat kepada semua pihak agar apabila sewaktu – waktu bencana terjadi menimpa Kabupaten Bogor, berbagai pihak dapat dengan sukarela membantu menyelesaikan proses tanggap darurat dan membantu menutupi segala kekurangan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bogor.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sistem manajemen tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh BPBD memberikan banyak dampak positif di berbagai daerah yang berada di daerah rawan longsor karena manajemen yang BPBD terapkan mampu menanggulangi kejadian longsor dengan sesegera mungkin dengan memanfaatkan destana dan TRC yang bertempat tinggal di daerah rawan longsor. penulis menemukan temuan penting yakni program DESTANA dan partisipasi masyarakat daerah rawan longsor memiliki peran yang sangat penting pada saat terjadinya bencana dalam melakukan proses tanggap darurat karena destana dan masyarakat sekitar lah yang pertama kali akan meninjau lokasi kejadian longsor yang terjadi di daerah mereka dan kemudian melaporkannya kepada BPBD pusat untuk diberikan tindakan lebih lanjut. Sama halnya dengan temuan Tictona bahwa membangun masyarakat dan pemerintah yang peduli dengan dampak akibat bencana alam, menerapkan manajemen bencana sesuai dengan

prosedur, memperagakan dan menyosialisasikan kepada masyarakat di daerah rawan merupakan tahapan dalam melakukan manajemen kebencanaan yang baik (Tictona dkk, 2020).

BPBD Kabupaten Bogor dalam melaksanakan fungsinya untuk menanggulangi bencana penulis menilai sudah cukup baik. Penulis melihat dari pemahaman para pejabat dan anggota yang berada di BPBD dalam memberikan penjelasan kepada penulis yang sangat baik disertai dengan pengamatan penulis ketika melihat tim reaksi cepat sedang melakukan simulasi penanggulangan bencana longsor, para anggota TRC sudah cukup cakap dalam melaksanakan pelatihan. Kemudian sistem peringatan dini terhadap getaran yang terjadi pada daerah rawan juga sudah memadai dilihat dari sistem informasi yang berada di kantor yang selalu memberikan pengumuman berupa audio visual mengenai letak dan besar getaran yang terjadi pada daerah rawan tersebut. Hal ini berbeda dengan temuan Nugroho yakni BPBD Kota Semarang tidak memiliki prosedur tetap pada penanganan dan pengawasan yang baik terhadap kejadian bencana.

IV. KESIMPULAN

Proses tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan dengan manajemen yang baik, mulai dari segi kaji cepat lokasi, kerusakan dan sumberdaya yang sudah dilakukan secara cepat dan tepat dengan memanfaatkan destana dan tim reaksi cepat yang berada di daerah lokasi terjadinya bencana longsor. Sehingga penilaian awal untuk penetapan status keadaan darurat pun bisa ditentukan sesegera mungkin. Kemudian dalam proses penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak longsor sudah terkelola dengan baik, dari segi pemenuhan kebutuhan dasar yang tepat sasaran dan tanpa ada keluhan dari masyarakat, perlindungan yang memprioritaskan kepada kelompok rentan seperti anak – anak, wanita hamil, lanjut usia, pasien rumah sakit semua sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir pemulihan kembali sarana dan prasarana vital yang dilakukan BPBD Kabupaten Bogor juga sudah cukup baik dengan mengutamakan pembuatan aliran air bersih, air minum, listrik, membuka akses jalan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, dan memperbaiki saluran komunikasi. Penghambat dari manajemen tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor terdiri dari banyaknya laporan palsu diterima oleh BPBD yang membuat terhambatnya proses tanggap darurat di wilayah yang memang benar terjadi bencana longsor, kemudian penghambat berikutnya adalah jarak yang jauh untuk sampai ke tempat bencana longsor terjadi disertai dengan kemacetan dan ketidakpedulian masyarakat untuk membuka jalan, dan penghambat yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang dimiliki kurang maksimal sehingga untuk bencana longsor besar BPBD Kabupaten Bogor belum bisa mengatasinya secara mandiri. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dari manajemen tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor adalah dengan meningkatkan kecermatan terhadap setiap laporan yang diterima dengan mewajibkan kepada setiap pelapor untuk menyertakan foto dengan keterangan waktu dan tempat kemudian meninjau secara langsung lokasi yang dilaporkan dengan memanfaatkan destana, aparat desa, dan tim reaksi cepat yang bertempat tinggal disekitar lokasi pelaporan. Upaya berikutnya adalah dengan melakukan koordinasi dan kerjasama kepada pihak berwenang dalam hal ini dinas perhubungan dan polisi lalu lintas untuk membuka akses jalan dan pendampingan serta dengan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membuka jalan. Kemudian upaya terakhir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bogor adalah dengan membangun hubungan kerja yang baik dengan berbagai pihak.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanpa melakukan penelitian ke dinas-dinas terkait.

Arah Masa Depan Penelitian (future Work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan sistem manajemen tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditunjukkan kepada BPBD Kabupaten Bogor yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fatiatun dkk. (2019). Analisis Bencana Tanah Longsor Serta Mitigasinya. *Jurnal Kajian Pendidikan Sains Vol. 5 No. 2*.
- Heryati, S. (2020) Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publi (JP dan KP), Vol 2, No. 2*, 139-146.
- Isnaini, R. (2019). Analisis Bencana Tanah Longsor di Wilayah Jawa Tengah. *Islamic Management and Empowerment Journal Vol. 1 No. 2*, 143-160.
- Laksono, A. D., Sesulihatien, W. T., & Fariza, A. (2011). Manajemen Emergency dan Evakuasi Untuk Bencana Banjir.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naryanto dkk. (2020). Analisis Pasca Bencana Tanah Longsor 1 Januari 2020 dan Evaluasi Penataan Kawasan Di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. *Jurnal Geografi Gea, Vol. 20, No. 2*
- Nisa, F. (2014). Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 2 No 2*.
- Nugroho, R. B., Mustam, M., & Lituhayu, D. (2014). Manajemen Bencana Dalam Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review Vol. 1 No.1*.
- Pratama, O. C., Rahayu, M. J., & Putri, R. A. (2017). Kajian Kesesuaian Manajemen Bencana Terhadap Komponen Manajemen Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Tinggi di Kabupaten Karangayar. *Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan Vol. 15 No. 1*.
- Rahman, A. Z. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*.
- Sappaile, B. I. (2007). Konsep instrumen penelitian pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan(006)*, 379-391
- Sari, Dwi A. (2017). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Sampang*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Malang
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Tictona, R. P. dkk. (2020). Manajemen Bencana Tanah Longsor di Desa Sambungrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*.

